

Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon Kabupaten Demak, Indonesia

Hamsar Suci Amalia*, Aulia Restu Ariyanto Putri, Mella Narolita, Rahmi Fadhella, Lirobbehim Sujjada, Denaya Putera

Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

hamsar.suciamalia@mesin.pnj.ac.id*

Abstrak

Pengembangan desa wisata memerlukan kelembagaan yang kuat agar pengelolaan destinasi dapat berjalan secara terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Desa Wisata Berahan Kulon, Kabupaten Demak, memiliki potensi wisata berupa Embung Rawa Serman, ekowisata pesisir, wisata religi, serta produk UMKM, namun masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, seperti belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, belum jelasnya pembagian peran, dan belum tersusunnya tata kelola pengelolaan desa wisata. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan desa wisata melalui pelatihan yang melibatkan Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, Karang Taruna, UMKM, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan program, penyusunan materi, persiapan pelaksanaan, dan pelaksanaan pelatihan. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test*, *post-test*, dan survei kepuasan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengetahuan peserta sebesar 39%, terutama terkait konsep pengembangan desa wisata, struktur dan fungsi kelembagaan, serta peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Selain itu, tingkat kepuasan peserta mencapai 91%, yang menunjukkan bahwa materi, metode, dan pelaksanaan pelatihan dinilai sangat baik. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Desa Wisata Berahan Kulon. Penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat.

Kata kunci: Desa Wisata, Kelembagaan, Penguatan Kelembagaan, *Participatory Rural Appraisal*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, *community based tourism* menjadi salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang marak dilakukan, salah satunya melalui konsep desa wisata. Konsep desa wisata menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi desa untuk layanan pariwisata (Dewi et al., 2016). Pengembangan desa wisata membantu masyarakat mengelola sumber

daya yang mereka miliki untuk membantu meningkatkan perekonomian, promosi pariwisata dan melestarikan lingkungan (Prasetyo et al., 2024). Keberadaan desa yang dijadikan sebagai destinasi wisata akan merasakan dampak di berbagai sektor yang ada. Secara ekonomi dengan adanya pengembangan wisata pedesaan maka tingkat perekonomian masyarakat akan mulai tumbuh dan berkembang, lapangan kerja akan mulai terbuka, aspek sosial dan budaya pun turut tumbuh dan berkembang (Abidin et al., 2021).

Dalam rangka mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, diperlukan perencanaan yang tepat. Salah satu unsur penting di dalamnya adalah kelembagaan desa wisata, dimana kelembagaan berperan dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Keberadaan dan peran kelembagaan sangat krusial sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata (Prafitri & Damayanti, 2016). Dalam aspek kelembagaan, diperlukan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun individu, sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan strategi dan program pengembangan desa wisata ((Suhendri et al., 2023).

Secara ideal, pengelolaan desa wisata memerlukan kelembagaan yang menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, disertai pembagian peran, integrasi antarpihak, dan peningkatan kapasitas berkelanjutan (Hirto & Laxmiawaty, 2025; Mulyani et al., 2021, Listyorini et al., 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek kelembagaan bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi mencakup visi, misi, strategi, nilai, serta hubungan peran dalam organisasi (Listyorini et al., 2021).

Sebaliknya, kondisi aktual pada kasus-kasus yang mirip dengan Desa Berahan Kulon menunjukkan pola masalah yang berulang: kemampuan manajerial anggota belum merata, peran pengurus belum terbagi jelas, dan evaluasi kegiatan belum terdokumentasi secara sistematis (Hirto & Laxmiawaty, 2025). Pada penelitian lain, bahkan ketika pengurus sudah memiliki legalitas formal, tata kelola tetap lemah karena belum ada deskripsi tugas yang jelas pada tiap struktur organisasi (Mulyani et al., 2021). Temuan serupa juga muncul pada Pokdarwis rintisan yang belum memiliki visi-misi, strategi pengembangan, program kegiatan, dan tupoksi anggota (Listyorini et al., 2021).

Salah satu desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata adalah Desa Berahan Kulon. Desa ini memiliki berbagai daya tarik, seperti kawasan Embung Rawa Serman, ekowisata pesisir, Makam Mbah Burhan, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta tradisi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata berbasis cerita (*storynomics tourism*). Potensi tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan produk wisata yang memiliki keunikan dan daya saing. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Desa Wisata Berahan Kulon masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama mitra, koordinasi antarorganisasi desa seperti Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, dan pelaku UMKM belum berjalan secara optimal. Pembagian tugas dan fungsi kelembagaan belum terdokumentasi dengan baik, mekanisme koordinasi masih bersifat *incidental* atau sewaktu-waktu serta belum tersusunnya standar operasional pengelolaan desa wisata menyebabkan berbagai program pengembangan belum terlaksana secara terpadu. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi wisata yang dimiliki belum dapat dikelola secara maksimal dan belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Perbandingan ini bisa dirumuskan sebagai gap dimana literatur menuntut tata kelola kelembagaan yang lengkap dan sistematis, tetapi kondisi aktual Desa Wisata Berahan Kulon sebagai desa wisata rintisan masih ditandai kelembagaan yang formalistik, peran yang tumpang tindih, dan kapasitas perencanaan yang rendah (Hirto & Laxmiawaty, 2025; Listyorini et al., 2021; Mulyani et al., 2021). Karena itu, pendekatan penguatan kelembagaan layak dipilih dibanding alternatif yang hanya berfokus pada promosi, infrastruktur, atau pelatihan layanan sesaat, sebab akar persoalannya berada pada kapasitas organisasi untuk merencanakan,

mengoordinasikan, membagi tugas, dan mengawasi pengelolaan desa wisata (Hirto & Laxmiawaty, 2025; Listyorini et al., 2021; Mulyani et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Negeri Jakarta melaksanakan kegiatan “Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon, Kabupaten Demak”. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas organisasi pengelola desa wisata melalui pelatihan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon sebagai destinasi yang berdaya saing serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

METODE

Kegiatan PkM Desa Wisata Berahan Kulon dilakukan pada 2 Juni 2026 berlokasi di Balai Pertemuan Desa Berahan Kulon. Sasaran kegiatan adalah unsur kelembagaan desa wisata yang terdiri atas Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, Karang Taruna, UMKM, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang yang terdiri dari kelompok usia tertinggi 36 – 40 tahun sebanyak 70% dan kelompok usia 17 – 24 tahun sebanyak 10% dan 31 – 35 tahun sebanyak 20%. Untuk jenis kelamin terdiri dari 20% laki-laki dan 80% berjenis kelamin perempuan, dengan latar belakang pendidikan sebanyak 90% lulusan SMA% dan 10 % lulusan sarjana, sebanyak 15% perangkat desa, 40% pedagang, sebanyak 45% lain - lain terdiri dari ibu rumah tangga, petani, dan buruh harian lepas. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berkontribusi pada pengembangan desa wisata dengan bergabung dalam kelompok sadar wisata, BumDes, UMKM, dan karang taruna.

Metode yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada. Selanjutnya masyarakat merumuskan solusi, dan menyusun rencana tindak lanjut pengembangan desa wisata sesuai dengan kondisi aktual (Hudayana et al., 2019). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi Kebutuhan
Tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara bersama pemerintah desa serta pengelola desa wisata untuk mengidentifikasi kondisi eksisting desa wisata, kelembagaan, pembagian peran antar lembaga, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Desa Wisata Berahan Kulon.
- b. Penyusunan Proposal
Tim pengabdian merumuskan program berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Program dituangkan ke dalam sebuah proposal.
- c. Penyusunan Materi Pelatihan
Perancangan bahan ajar atau materi pelatihan yang menitikberatkan pada tugas pokok dan fungsi lembaga, mekanisme koordinasi antar lembaga.
- d. Persiapan Pelaksanaan
Tim pengabdian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Berahan Kulon terkait pelaksanaan pelatihan dan mempersiapkan segala kebutuhan tim.
- e. Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan pelatihan “Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata”. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan metode *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta pelatihan dan survei kepuasan peserta untuk menilai keberhasilan program dan kepuasan peserta. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta berupa kuesioner dengan jumlah

pertanyaan 5 butir pertanyaan untuk *pretest* dan 5 butir pertanyaan untuk *posttest*, skala penilaian menggunakan skala Likert 1-5 dengan hasil disajikan dalam bentuk presentase. Analisis *pretest* dan *posttest* menunjukkan adanya peningkatan skor dalam bentuk persentase. Penilaian kepuasan menggunakan instrumen kuesioner dengan jumlah 5 butir pertanyaan yang memfokuskan pada kepuasan pelaksanaan dan kemampuan narasumber. Skala penilaian menggunakan skala Likert 1-5 dihitung dalam bentuk persentase dan dideskripsikan secara kualitatif. Berikut adalah diagram alir dari proses pengabdian yang dilaksanakan:



Gambar 1. Diagram Alir Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Desa Berahan Kulon

Kegiatan PkM Desa Wisata Berahan Kulon berupa pelatihan berjudul Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Berahan Kulon pada tanggal 2 Juni 2026 dan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, Karang Taruna, UMKM, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Materi pelatihan difokuskan pada pemahaman mengenai konsep kelembagaan desa wisata, pembagian peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan, tata kelola organisasi yang kolaboratif, serta pentingnya sinergi antaraktor dalam mendukung pengembangan desa wisata. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Desa Wisata Berahan Kulon.

Melalui pelatihan tersebut masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kelembagaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan desa wisata. Peserta memahami bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada daya tarik wisata semata, namun juga pada koordinasi, pembagian tugas, kerja sama, serta komitmen seluruh unsur kelembagaan desa. Suasana kegiatan pelatihan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 2. Foto Bersama Peserta

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan kelembagaan desa wisata. Pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan dan dilaksanakan melalui lima tahapan yaitu:

a. Identifikasi Kebutuhan

Observasi dilaksanakan oleh tim pengabdian untuk memetakan kondisi eksisting pariwisata dan mengidentifikasi kelembangaan di Desa Wisata Berahan Kulon. Pada tahap ini tim pengabdian mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan termasuk kesulitan, permasalahan krusial dengan melakukan proses wawancara dengan perwakilan masing-masing lembaga di Desa Berahan Kulon. Informasi yang didapatkan menjadi landasan yang kuat untuk menyusun program pelatihan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

b. Penyusunan Proposal

Setelah mengumpulkan temuan dan data lapangan melalui kunjungan pra pengabdian, tim pengabdian melakukan perumusan program dan penyusunan Proposal PkM. Proposal tersebut berisi analisis situasi, permasalahan prioritas, dan solusi. Berdasarkan permasalahan yang ada, tim pengabdian merumuskan pelatihan penguatan kelembangaan desa wisata yang menitikberatkan pada tugas dan koordinasi antar lembaga desa wisata untuk membangkitkan dan mempererat kerja sama dan koordinasi antar lembaga demi memajukan Desa Wisata Berahan Kulon.

- c. **Penyusunan Materi Pelatihan**
Tim pengabdian menyiapkan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa Wisata Berahan Kulon setelah menyelesaikan proposal. Materi difokuskan pada penguatan kelembagaan desa wisata yang meliputi konsep dan pentingnya kelembagaan, peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, mekanisme koordinasi antar lembaga, pembagian tugas, serta strategi membangun kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata. Penyusunan materi dilakukan dengan mengacu pada kajian ilmiah, kebijakan tentang desa wisata, serta hasil identifikasi permasalahan di lapangan sehingga materi yang disampaikan bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan peserta.
- d. **Persiapan Pelaksanaan**
Tim pengabdian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Berahan Kulon dan para pemangku kepentingan terkait untuk menentukan jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, peserta yang akan mengikuti pelatihan, serta kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, tim juga menyiapkan perangkat pendukung seperti modul pelatihan, bahan presentasi, instrumen evaluasi (*pre-test*, *post-test*, dan evaluasi kepuaran peserta pelatihan), dokumentasi kegiatan, dan pembagian tugas anggota tim sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**
Pelaksanaan kegiatan PkM berjudul "Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata" yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Desa Berahan Kulon pada tanggal 2 Juni 2026 dan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, Karang Taruna, UMKM, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa disusul dengan Ketua Tim PkM; penyampaian materi mengenai pentingnya kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata; diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta identifikasi peran dan bentuk kolaborasi antar lembaga. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya koordinasi, pembagian tugas, dan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai dasar pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk ketercapaian tujuan pelatihan. Proses *monitoring* dilaksanakan selama kegiatan berlangsung melalui pengamatan keaktifan peserta, keterlibatan dalam diskusi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun. Peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengikuti acara secara aktif, mengajukan berbagai pertanyaan terkait pengelolaan kelembagaan desa wisata, serta memberikan tanggapan dan berbagi pengalaman mengenai kondisi yang dihadapi di Desa Wisata Berahan Kulon.

Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta tentang kelembagaan, berikut adalah hasil evaluasinya:

Tabel 1. Capaian *Pre Test* dan *Post Test*

No	Pernyataan Evaluasi	Capaian <i>Pre Test</i>	Capaian <i>Post Test</i>	Peningkatan
1.	Pemahaman konsep wisata pengembangan desa wisata	46%	85%	39%
2.	Pemahaman pentingnya pengelolaan organisasi dalam desa wisata	45%	82%	37%
3.	Pengetahuan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata	47%	87%	40%
4.	Pengetahuan struktur organisasi dan fungsi kelembagaan desa wisata	45%	90%	45%
5.	Kemampuan identifikasi potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Berahan Kulon	48%	82%	34%
Rata-Rata Peningkatan Pengetahuan				39%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pada peserta pelatihan sebesar 39%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas peserta, baik dalam memahami konsep dasar pengembangan desa wisata maupun aspek kelembagaan, sehingga menjadi bekal bagi Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, UMKM, dan Karang Taruna, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi, menjalankan peran masing-masing secara optimal, serta mendukung pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon.

Kepuasan Peserta Pelatihan

Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan PkM, tim pengabdian melakukan survei kepuasan peserta dengan membagikan kuesioner kepada seluruh peserta pelatihan. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pernyataan yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, meliputi aspek materi, metode penyampaian dan narasumber, interaksi selama pelatihan, serta manfaat yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Berikut adalah hasil survei kepuasan peserta pelatihan:

Tabel 3. Kepuasan Peserta Pelatihan

No	Pernyataan Kepuasan	Capaian Kepuasan
1.	Kepuasan terhadap materi pelatihan yang disampaikan.	90%
2.	Kepuasan terhadap kemampuan narasumber dalam menjelaskan materi	93%
3.	Kepuasan tentang contoh-contoh keberhasilan kelembagaan dalam desa wisata	88%
4.	Kepuasan dalam pemberian kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pendapat.	95%
5.	Kepuasan dalam pelaksanaan pelatihan	88%

Berdasarkan hasil survei kepuasan peserta, pelaksanaan pelatihan Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata memperoleh rata-rata tingkat kepuasan sebesar 91%, yang menunjukkan bahwa kegiatan telah terlaksana dengan sangat baik dan sesuai dengan harapan peserta.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM melalui pelatihan penguatan kelembagaan Desa Wisata Berahan Kulon mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan desa wisata yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Pelatihan mendorong terbangunnya sinergi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis Restu Bumi, BUMDes Yo Ben Tho, Karang Taruna, UMKM, dan masyarakat, sehingga peserta mampu memahami pembagian peran, mengidentifikasi potensi desa, serta mengembangkan produk wisata berbasis potensi lokal.

Penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Berahan Kulon. Untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan melalui pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan tata kelola yang jelas, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini didanai oleh Politeknik Negeri Jakarta melalui Skema Utama Berdampak dengan Nomor kontrak 527/DST/PL3.14/B/PM.01.03/2026, tanggal 4 Mei 2026. Terima kasih kepada Desa Wisata Berahan Kulon, Kabupaten Demak, anggota Pokdarwis Restu Bumi, BumDes Yo Ben Tho dan UMKM yang telah bersedia diberikan pelatihan, memberikan data dan informasi berharga kepada penulis dan tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., Fedrina, R., & Agustin, R. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata melalui Promosi Digital Marketing di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 3.
- Dewi, R., Ahsani, P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., Aerani, E., Studi, P., & Negara, I. A. (2016). *Penerapan Konsep Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa*.
- Hirto, V. A., & Laxmiawaty, S. (2025). Pelatihan Kelembagaan Desa Wisata Pada Pokdarwis Tomajiko Pulau Hiri Maluku Utara. *Jurnal Abdi Anjani*, 3(2). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/anjani/issue/view/86>
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, A., Indiyanto, Z., Fauzan, M., Dyah, F. N., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul* (Vol. 2, Number 2).

- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan, M. (2021). *Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas Dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi*. 5(2). <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083>
- Mulyani, Y., Mahfud, T., Winnarko, H., Gafur, A., Rustika, R., Nurdin, I., Perhotelan, J., & Negeri Balikpapan, P. (2021). Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pengurus Desa Wisata Teritip. In *JAT* (Vol. 1, Number 1).
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota (Journal of Urban Development)*, 4(1).
- Prasetyo, B. D., Febriani, N. S., & Dewi, W. W. A. (2024). Community Based Tourism (CBT) sebagai Model Pengembangan Desa Wisata Adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 92. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.9285>
- Suhendri, Helena, D., & Pahrudin. (2023). Institutional strengthening in village ecotourism development. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 5(1), 77–88. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i1.19798>